

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Ali, Acmad 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. ed. 1, cet. 1. Kencana. Jakarta.
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisri, Ilham, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2018, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Nusa Media. Bandung.
- Mamudji, S. S, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, 2014, *Hukum Pembuktian : Teori – Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Alumni, Bandung.
- S, Eddy. O, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. ed. 1, cet. 6. Kencana. Jakarta,
- Setiawan, Ketut Oka, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*. ed. 1, cet. 3, Kencana, Jakarta
- Sinaga, V. Harlen, 2015, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suadi, Amran, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Menakar Beracara Di Pengadilan Secara ELEktronik*. ed. 1, cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*. ed. 1, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Syahrani, Riduan, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. ed. 4, cet. 2, Alumni. Bandung.

Tarjo, 2019, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, Deepublish. Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, ed. 1, cet. 1. Raja Grafindo. Depok.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Petunjuk Teknis Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Nomor 2 Tahun 2020.

C. JURNAL DAN WEBSITE

Alimuddin, Nur Hidayah, 2021, “*Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia.*” Jurnal SASI, Vol. 27, No. 3, 335 – 345, 2021.

Azizah, Nur, 2022, “*Pendaftaran Hak Tanggungan Secara ELEktronik (Studi di Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara).*” Jurnal NoLaj, Vol. 1(Issue 2), 84-99, 2022.

Febrianti, Suci, 2021, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah ELEktronik.*” Indonesia Notary, Vol. 3, No.3, 197 – 219. 2021

Fikhriyah, Efa Laela, 2015, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2, 135-153, 2015.

Guntoro, Jefri, 2020, "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Bengkoelen Justice*, Vol. 10 No. 2, 212-225, 2020.

Imanda, Nadia, 2020, "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Notaire*, Vol. 3, No.2, 2020.

Krisnawan Andiyanto, Krisnawan, 2021, "Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru." *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, 198-210, 2021.

Riyanto, Benny, 2020, "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, 161-181, 2020.

Septianingsih, 2015, "Studi Tentang Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Samarinda." *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 265 – 278, 2015.

Kormen Barus, "BTN Jadi Pilot Project Layanan Hak Tanggungan Elektronik yang Diluncurkan BPN", <https://www.industry.co.id/read/55071/btn-jadi-pilot-project-layanan-hak-tanggung-an-elektronik-yang-diluncurkan-bpn>, dikunjungi pada tanggal 19 September 2022 Jam 19.57.

Rakhmat Baihaqi, "Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan Pertanahan Berbasis Elektronik", <https://ekbis.sindonews.com/berita/1436317/34/kementerian-atrbpn-luncurkan-layanan-pertanahan-berbasis-elektronik>, dikunjungi pada tanggal 17 September 2022 Jam 21.04.

Rizki Fitriani, "HT-el: Kebijakan Layanan Pertanahan Hak Tanggungan", <http://swaraneews.com/baca-1699-ht-el-kebijakan-layanan-pertanahan-hak-tanggung-an>, Dikunjungi pada tanggal 19 September 2022 Jam 20.17

SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai, "Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai",

<https://kkp.go.id/SKPT/Mentawai/page/1133-skpt-kabupaten-kepulauan-mentawai>, dikunjungi pada tanggal 25 September 2022 Jam 21.55.

Suhaiela Bahfein, “Mulai Hari Ini, Hak Tanggungan Elektronik Berlaku Resmi Di Indonesia”, <https://properti.kompas.com/read/2020/07/08/162559521/mulai-hari-ini-hak-tanggungan-elektronik-berlaku-resmi-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 17 September 2022 Jam 21.21.

Syarif Hasan Salampessy, “BPN Resmi Terapkan Hak Tanggungan Elektronik Nasional”, <https://rri.co.id/ekonomi/864657/bpn-resmi-terapkan-hak-tanggungan-elektronik-nasional>, dikunjungi pada tanggal 17 September 2022 Jam 21.10.

